

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

SURTHI RAHAYU

11770523133

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SURTHI RAHAYU
 NIM : 11770523133
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
 CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
 KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
NIK. 130 717 057

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SURTHI RAHAYU
 NIM : 11770523133
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
 CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
 KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI
 TANGGAL UJIAN : SELASA, 20 APRIL 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA



 FAKHRURROZI, SE, MM
 NIP. 19670725 200003 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI I


 DEVI DESWIMAR, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 411 027

PENGUJI II


 MHD. RAFI, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 059

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

SURTHI RAHAYU
NIM 11770523133

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan-persoalan yang muncul pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi selama 1 tahun terakhir. Persoalan dimulai saat masuknya wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat pada tahun 2020 lalu. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kondisi Covid-19 ini membuat para ASN diharuskan melakukan pekerjaan secara virtual atau online sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kecamatan Cerenti menjadi kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan indikator berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa tugas dan fungsi camat yang tidak terlaksana dengan semestinya dalam rencana kerja kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan juga mengalami perubahan pada pertengahan Juni 2020 lalu akibat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga beberapa tugas dan fungsi camat mengalami kemunduran dalam waktu penyelesaiannya serta mengalami perubahan dalam sistem kerjanya. Sedangkan kendala yang dihadapi terdapat pada anggaran yang terbatas karena Covid-19. Kemudian waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, masih adanya sumber daya manusia (SDM) yang belum cakap dalam penggunaan teknologi. Serta adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi Camat, Pandemi, Covid-19



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan. Untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta do'a yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sudiharto dan Ibunda Yulasmi, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu untuk penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
2. Adik-adik ku tersayang Dwi Suchi Rahayu dan Tri Perdiance, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
7. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si. selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
8. Ibunda Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan demi kelancaran penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
10. Pemerintah Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Sekian dan Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTARTABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pemerintahan Daerah.....	9
2.2 Organisasi	12
2.3 Kecamatan	14
2.4 Pandangan Islam Terhadap Pemimpin	16
2.5 Penelitian terdahulu	19
2.6 Definisi Konsep	27
2.7 Konsep Operasional.....	28
2.8 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Sumber Data	30
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisa Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Kecamatan Cerenti	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1 Geografis	34
4.1.2 Demografis	35
4.2 Kantor Camat Cerenti	36
4.2.1 Sejarah	36
4.2.2 Visi dan Misi	37
4.2.3 Tugas dan Fungsi Camat	37
4.2.4 Struktur Organisasi	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	40
5.1.1 Penyesuaian Sistem Kerja (WFH/WFO)	42
5.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas....	47
5.1.3 Penerapan Standar Kebersihan	54
5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	57
5.2.1 Anggaran	57
5.2.2 Waktu	58
5.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM)	59
5.2.4 Sarana dan Prasarana	60

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	62
6.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	28
Tabel 3.1	32
Tabel 4.1	35
Tabel 4.2	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	29
Gambar 4.1	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan bentuk nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah. Peraturan Daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak hanya pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam sistem otonomi daerah dikenal beberapa istilah seperti Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.²

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu oleh wakilnya serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di daerah tersebut.

¹ Natal Kristiono, S.Pd., MH., "*Buku Ajar Otonomi Daerah*", (Semarang : Universitas Negeri Malang, 2015), hlm. 1-8

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.³ Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa, Kecamatan adalah Perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat. Camat merupakan pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.⁴ Camat memiliki tugas dan fungsinya tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya di lingkup kecamatan.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki 15 Kecamatan, salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Cerenti. Di Kecamatan Cerenti dalam pelaksanaannya di ruang lingkup daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tugas dan fungsi camat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu Camat mempunyai tugas

³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, hlm. 2

⁴ Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi camat terdiri dari 17 fungsi.

Namun tugas dan fungsi camat mengalami beberapa perubahan dalam sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada tahun 2020 terdapat kasus berupa wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019*. Virus ini sudah ada pada tahun 2019 di China, namun masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Seperti yang diketahui, kehadiran virus ini mengakibatkan beberapa hal terhambat bahkan sama sekali tidak bisa dilakukan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan berupa:

1. Penyesuaian Sistem Kerja, yaitu Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas, yaitu seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat atau daerah agar ditunda atau dibatalkan.
3. Penerapan Standar Kebersihan, yaitu pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan Pembersihan/Sterilisasi lingkungan kerja masing-masing instansi.

Dapat diketahui bahwa pemerintah menganjurkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan agar dapat dilakukan dari rumah atau *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)*. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.⁵

Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa tugas dan fungsi camat yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan mengalami perubahan dalam cara kerja pelaksanaannya. Di masa pandemi Covid-19, tugas dan fungsi camat tidak dapat berjalan lancar.

⁵ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa pandemi semua kegiatan diharapkan dapat berbasis virtual/online, namun di Kecamatan Cerenti sistem tersebut belum dapat dilaksanakan. Karena secara teknis, fasilitas di Kecamatan tidak memadai. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan yang berbasis online/offline ini juga dibutuhkan pegawai yang cakap dalam penggunaan teknologi. Namun, di kecamatan Cerenti masih memiliki beberapa pegawai yang kurang cakap akan teknologi tersebut.

Perubahan sistem kerja juga terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi camat saat melakukan kegiatan seperti rapat. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu atau dari pihak perwakilan saja. Tidak hanya itu perubahan pelaksanaan pada kegiatan seperti sosialisasi juga terjadi. Camat tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara langsung dan dengan jumlah masa yang banyak seperti sebelumnya. Sehingga kegiatan tugas dan dan fungsi camat tidak berjalan lancar seperti sebelumnya.

Sedangkan untuk pelayanan yang diharapkan dapat berbasis online tidak bisa dilakukan dikarenakan sistem kerja di Kecamatan Cerenti yang masih manual sehingga membuat kerja kecamatan selama pandemi sedikit terhambat. Kemudian, pada tugas dan fungsi camat ini juga mengalami keterlambatan waktu dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Jadi, berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat pada masa pandemi covid-19 dan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia kerja nantinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor agar dapat memperbaiki atau mengevaluasi kinerja ke arah yang lebih baik lagi.

3. Bagi Objek Pustaka

Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang kajian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan hal yang berkaitan dengan keadaan kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab V ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab VI ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Menurut C.F. Strong, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, Pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.⁶ Dalam pengertian luas maupun sempit, pemerintahan tetap berkaitan erat dengan badan-badan publik, yang mana pemerintahan itu suatu hal yang tak bisa dipisahkan dari kekuasaan.

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang di bantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

⁶BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur), "Pemerintahan", (URL: <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>) diakses pada 15 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Pemerintahan pusat memiliki wewenang terhadap semua hal yang ada di negara tersebut termasuk mengurus pemerintahan daerah yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.⁸

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan-hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras.⁹ Dalam pemerintahan daerah memiliki asas yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

⁷*Ibid.*, hlm. 2

⁸Dudung Abdullah, 2016, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 1, hlm. 87-88

⁹Dr. Ardiansyah, M.Si., "Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa", (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹⁰ Asas otonomi tersebut adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.¹¹ Dengan otonomi daerah atau penyerahan sebagian daerah akan lebih cepat dan efektif dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat.¹²
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.¹³ Tugas pembantuan juga disebut sebagai tugas pemerintah untuk daerah dan/atau desa, kabupaten/kota ke desa untuk melakukan tugas-tugas tertentu.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

¹¹ Ani Sri Rahayu, “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 156

¹² Drs. Muhammad, M.Si., “Pengantar Ilmu Administrasi Negara”, (Sulawesi: Unimal Press, 2019) hlm. 77

¹³ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁴ Amelia Haryanti, “Sistem Pemerintahan Daerah”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm.30

2.2 Organisasi

Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistematis adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang benar dalam sistem sosial.¹⁵

Dwight Waldo mendefinisikan bahwa Organisasi itu adalah struktur interalasi-interelasi otoritatif dan personal habitual di dalam sistem administrative. Lalu, Karl Weick juga mendefinisikan Organisasi sebagai suatu tata bahasa yang disahkan secara consesus untuk mengurangi kesamaran melalui perilaku-perilaku yang pantas yang saling bertautan satu sama lain.¹⁶

Davis mengategorikan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan.¹⁷ Demikian pula Miller mendefinisikan organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan demikian mengandung ciri-ciri hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.¹⁸

Namun pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber dengan mendemonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi. Weber membedakan suatu kelompok kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.

¹⁵ H. Muhammad Rifa'I, M.Pd., dan Muhammad Fadhli, M.Pd., "*Manajemen Organisasi*", (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2016), hlm. 59

¹⁶ Agus, M.Si., "*Manajemen Organisasi*", (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm. 20

¹⁷ Dr. Candra Wijaya, M.Pd., "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm.49

¹⁸ Syamsir Torang, "*Manajemen Organisasi (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Weber kelompok kerja sama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya.

Aspek pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa unsur organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur-unsur *properties* sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*bounderies*). Dengan demikian, seseorang individu melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini mempunyai proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini adalah terdapatnya hierarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini yaitu

bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.¹⁹

2.3 Kecamatan

Definisi kecamatan adalah sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat II (kabupaten/kota), serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa didalamnya. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui perantara seorang sekretaris daerah. Ada beberapa unsur yang terdapat didalam satu kecamatan, antara lain: Camat, Sekretaris Kecamatan serta beberapa seksi dan beberapa sub bagian di bawahnya.

Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan.
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintah.
- d. Membina pemerintah tingkat desa atau kelurahan.
- e. Mengevaluasi pelayanan pemerintah di desa atau kelurahan.²⁰

Kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ini, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

¹⁹ Miftah Thoha, "Ilmu Administrasi Publik Kontemporer", (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.165-166

²⁰ Pengertian Kecamatan dan Kelurahan Menurut Para Ahli, 2015, (URL: <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kecamatan-dan-kelurahan/>), diakses pada 15 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembentukan kecamatan menurut PP No. 17 Tahun 2018, dilakukan melalui:

- a. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; atau
- b. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru.

Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan kecamatan ini dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

Persyaratan dasar meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Usia minimal kecamatan; dan
- d. Jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan

Persyaratan teknis pembentukan kecamatan meliputi:

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. Persyaratan teknis lainnya.

Persyaratan teknis lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Nama kecamatan yang akan dibentuk;
- c. Lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk; dan
- d. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, Persyaratan Administrasi dalam pembentukan kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk.

Pembentukan kecamatan ini dilakukan dalam rangka kepentingan strategis nasional, yaitu pemerintah pusat dapat menugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membentuk kecamatan.²¹

2.4 Pandangan Islam terhadap Pemimpin

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat merupakan pemimpin disebuah kecamatan.

Namun dalam pandangan Islam pemimpin dikenal dengan istilah imam, amair atau sultan, ulil amri atau walatul amr. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَخْنَ نُّسَبًا ۙ وَنُحْبِطُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, hlm. 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."*

Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan mengomandoi dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah. Jelas bahwa faktor keimanan ini menjadi tolak ukur untuk memilih dan tidak menjadikan kafir sebagai pemimpin, seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam firmanNya Surah Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang*

ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”

Dan sebagai pemimpin, ia harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan di doakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: *“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu, kalau melaknati mereka dan mereka melaknati kamu”*. (Hadist Riwayat Muslim).

Selanjutnya terdapat ancaman bagi pemerintah yang tidak mau amanah dalam melayani masyarakat, seperti hadist Rasulullah SAW : *Abu Ja’la (Ma’qil) bin Jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: “tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya Surga”*. (HR. Bukhori dan Muslim)

Keberadaan pemerintah di dalam Islam mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dan mendapatkan penghormatan, Allah SWT berulang kali menyebutkan ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah yang sah merupakan kaidah yang harus dipatuhi. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa' (4): 59)

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah. Dan dalam memilih seorang pemimpin haruslah dilihat dari agamanya terlebih dahulu karena itu akan menentukan sikap dan sifat dari pemimpin tersebut. Dan juga pilihlah mereka yang mengerti akan keadaan rakyat dan memihak pada rakyat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 6 penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Peneliti **Indra Tri Gunawan (2018)**, dengan judul **"Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan Di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi"**. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: Pelaksanaan koordinasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah di Kelurahan Pasar Taluk mulai dari jadwal musyawarah, agenda musyawarah hingga pelaksanaan hasil musyawarah cukup terimplementasi.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi musyawarah yaitu disebabkan oleh banyaknya agenda penting yang perlu dilaksanakan pihak kelurahan berdasarkan skala prioritas, kegiatan mendesak lainnya seperti persiapan pacu jalur, kurangnya koordinasi antar perangkat di tingkat RT, RW dan lingkungan, dan kurangnya dana sehingga musyawarah berikutnya tidak terlaksana. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data monografi kelurahan di Kelurahan Pasar Taluk yang meliputi pengumpulan data kelurahan, valid data kelurahan dan penggunaan data kelurahan tidak terimplementasi, dikarenakan monografi belum lengkap. Monografi kelurahan baru dapat diselesaikan bila data kelurahan telah terkumpul secara keseluruhan dari keempat kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Pasar Taluk tersebut.

Pelaksanaan koordinasi penyajian data kependudukan di Kelurahan Pasar Taluk yang meliputi pengumpulan data kependudukan, penyesuaian data kependudukan dan evaluasi data tidak terimplementasi. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang sudah tidak berdomisili lagi di lokasi tersebut dan secara administrasi masih belum pindah karena surat keterangan pindahnya belum diurus. Selain itu kendala waktu pelaksanaan pendataan yang tidak sesuai dengan jadwal penduduk berada di rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pelaksanaan pendataan di beberapa RT di Kelurahan Pasar Taluk tidak selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan di Kelurahan Pasar Taluk yang meliputi pendataan pertanahan, pembahasan masalah pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan tidak terimplementasi. Hal ini disebabkan besarnya dana yang harus dikeluarkan dan kurangnya personil dari bagian pertanahan Dinas Permukiman Pendudukan untuk melakukan pendataan tanah, dan permasalahan pertanahan sepadan wilayah antara Desa Koto Taluk, Kelurahan Pasar dan Desa Beringin Taluk.

2. Peneliti **Nuzul Fitra Salam (2019)**, dengan judul penelitian "**Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018**". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: Kedudukan Kecamatan dan camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemerintah desa menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 adalah tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan.

Status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dan setara dengan dinas dan lembaga teknis Daerah. Fungsi camat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan membina penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya faktor yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia ini dibagi menjadi beberapa unsur diantaranya adalah camat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Diantara ketiga unsur tersebut hanya ada satu unsur yang memberikan pengaruh terhambatnya tugas dan fungsi camat, unsur tersebut ialah unsur kepala desa, adanya kepala desa yang kemampuan teknologinya kurang atau biasa disebut dengan gagap teknologi (Gaptek) mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui online mengingat teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi memang sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi online antara camat dengan kepala desa.

3. Peneliti **Ghifari M Farisi (2018)**, dengan judul penelitian **“Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)”**. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo adalah Kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas.

Ditambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil sementara terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelimpahan kewenangan yang begitu banyak. Sehingga kecamatan kekurangan pegawai yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis.

Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan kecamatan untuk mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

4. Peneliti **La Ode Yamin, Syahbuddin, dan Nerlin (2017)**, dengan jurnal penelitian berjudul, **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat (Studi di Kantor Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna)”**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat secara umum telah dilaksanakan dengan maksimal.

Hal tersebut dapat dilihat pada perannya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan. Pada tugas ini camat telah melakukan koordinasi dengan para kepala desa/lurah serta dengan tokoh masyarakat dengan baik sebagaimana dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat camat Napabalano belum berjalan maksimal terutama dalam hal pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Faktor-faktor yang menghambat camat Napabalano dalam Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat dilingkup wilayah kecamatan Napabalano adalah sarana prasarana yang terbatas, kualitas sumber daya manusia para pegawai, keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan serta kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur kepengurusan.

5. Peneliti **Siti Marwiyah, Nur Halima, dan Finni Maulidi (2020)**, dengan Jurnal Penelitian berjudul, **“Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19”**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: dari hasil penelitian yang dilakukan pada 07 April 2020 dengan 4 narasumber yaitu sekretaris Lurah dan 3 staf bagian pelayanan publik di Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo, dijelaskan bahwa seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik memiliki persepsi tentang perannya di dalam kehidupan organisasinya.

Dari hasil wawancara, dapat dibuktikan bahwa Lurah Ketapang merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Dari dimensi inspirasional, hasil wawancara dari empat narasumber juga membuktikan bahwa Lurah merupakan sosok pemimpin yang berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti seorang bapak yang sangat mengayomi dan memotivasi para bawahannya dan memberikan dorongan kepada bawahan dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya.

Namun saat terdapat suatu polemik yang dimana mengharuskan lurah untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan, Lurah hanya meminta pendapat kepada Camat atau pada sesama Lurah, tidak melibatkan pendapat dari para bawahannya. Tidak hanya pada saat terjadi polemik pandemi Covid-19, Lurah dapat langsung memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Kelurahan Ketapang. Hal tersebut membuat lurah tidak perlu meminta pendapat atau persetujuan dari bawahannya, karena legitimasi kepemimpinannya berarti dalam penerimaan atas peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi.

Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak membuat pelayanan publik diberhentikan. Pelayanan publik tetap berjalan baik secara langsung maupun secara *online*. Namun, dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, pihak kelurahan Ketapang juga menerapkan peraturan dari pemerintah yaitu pengurangan jam kerja yang dimana biasanya dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB sekarang dirubah menjadi pukul 08.00 s/d 13.00 WIB. Pihak kelurahan juga meniadakan kursi pelayanan yang biasanya dapat diduduki oleh warga yang sedang melakukan pengurusan data di kelurahan Ketapang. Hal tersebut juga merupakan upaya pencegahan Covid-19 dimana dalam proses pelayanan warga dapat menjaga jarak dengan para staf yang melayani mereka. Pemerintah juga melarang masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai untuk berjabat tangan baik itu antara pegawai dengan sesama pegawai ataupun antara pegawai dengan warga masyarakat.

6. Peneliti **Larasati Ahluwalia dan Kemala Puji (2020)**, dengan Jurnal Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Keseimbangan Pekerjaan-Rumah di Masa Pandemi Covid-19”**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan pekerjaan-rumah dan kinerja karyawan dalam masa pandemi saat ini.

Kepemimpinan pemberdayaan dapat memengaruhi rasa seimbang antara pekerjaan dan rumah, terutama di masa pandemi saat ini. Hal tersebut disebabkan karena pemimpin memberikan delegasi tugas yang mengarahkan karyawan untuk memimpin dirinya sendiri. Selain itu, pemimpin memberikan kepercayaan pada bawahan untuk berkinerja tinggi. Kepemimpinan pemberdayaan juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di masa pandemi saat ini.

Karyawan diberikan otonomi pekerjaan yang memungkinkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri agar hasil lebih efektif. Karakteristik kepemimpinan pemberdayaan kerap melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan. Hal tersebut dapat membuat karyawan merasa dilibatkan dan meningkatkan komitmen kerja yang berdampak pada kenaikan kinerja mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
2. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka (9) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan)
3. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah. (Pasal 1 angka (10) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan)
4. Kecamatan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. (Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. (Pasal 1 angka (8) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan)

6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa pandemi covid-19 dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*)/(*work from office*) bekerja dari kantor bagi aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran covid-19. (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020)

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.1: Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	1. Penyesuaian Sistem Kerja (WFH/WFO)	a. Rapat Koordinasi b. Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran/teknis lapangan c. Pemeliharaan sarana/prasarana dan fasilitas pelayanan
	2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	a. Pembuatan rumusan kebijakan teknis, rencana program dan rencana kerja anggaran b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat c. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah
	3. Penerapan Standar Kebersihan	a. Sosialisasi

Sumber: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

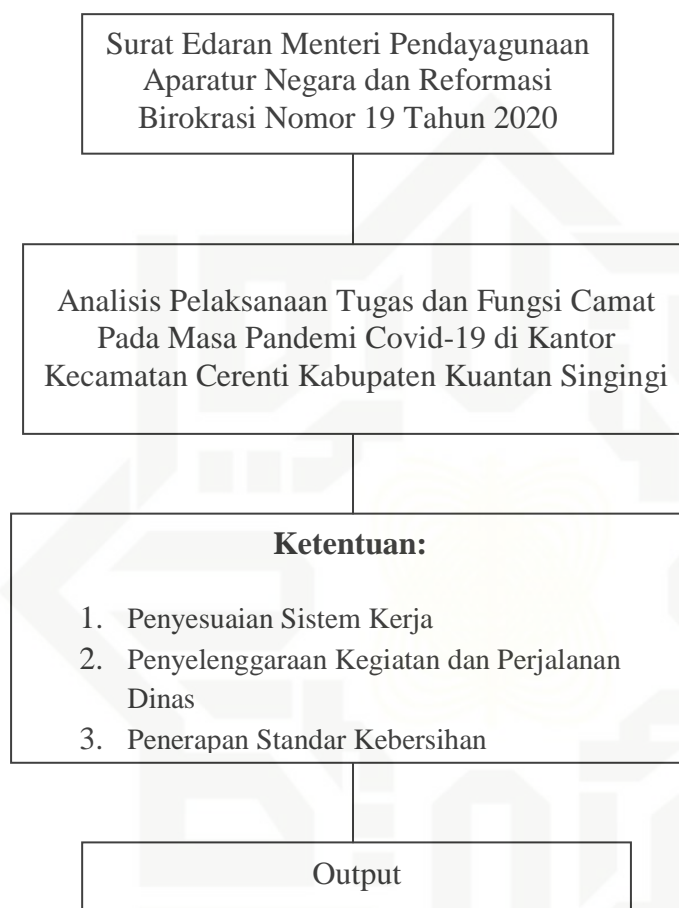
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian di Kantor Camat Cerenti ini dilakukan karena berdasarkan observasi dan data yang penulis dapatkan, Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada masa pandemi Covid-19 ini tidak berjalan dengan lancar. Sementara waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2020 sampai dengan April 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.²² Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Administrasi*”, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 11

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian, berupa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan Staf bagian umum serta sejumlah masyarakat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Yaitu data relevan dalam melengkapi data primer yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber tidak langsung memberikan data yang biasanya melalui perantara melalui orang lain atau dokumen, buku, artikel, laporan atau arsip resmi.²³

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian atau biasa disebut dengan responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Informan penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.²⁴

Untuk penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik

²³ *Ibid.*, hlm.14

²⁴ Arikunto, “*Prosedur Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 145

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera.
- Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung pada pihak-pihak terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa hal seperti dokumen, arsip, buku dan lainnya.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis

²⁵ Ibid., hlm. 85

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi key informan benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kriteria	Jumlah (Orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Staf Bagian Umum	1
5	Masyarakat	5
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera.
- Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung pada pihak-pihak terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa hal seperti dokumen, arsip, buku dan lainnya.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis

²⁵ Ibid., hlm. 85

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi key informan benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kriteria	Jumlah (Orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Staf Bagian Umum	1
5	Masyarakat	5
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera.
- Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung pada pihak-pihak terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa hal seperti dokumen, arsip, buku dan lainnya.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis

²⁵ Ibid., hlm. 85

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus hingga menjadi data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data, yaitu lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola.²⁷
- c. Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- d. Verifikasi data merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validitasnya.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 244

²⁷ Salim dan Syahrur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Ciptapustaka Media, 2015), hlm. 148

²⁸ Dr. Sahya Anggara, M.Si., "*Metode Penelitian Administrasi*", (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kecamatan Cerenti

4.1.1 Geografis

Ibukota Kecamatan Cerenti adalah Desa Kampung Baru Timur. Secara geografis Kecamatan Cerenti terletak antara 01°05' Lintang Selatan sampai 02°25' Lintang Utara atau antara 100°00' sampai 105° 05 Bujur Timur. Kecamatan Cerenti memiliki luas $\pm 453 \text{ km}^2$, yang terbagi menjadi 11 Desa dan 2 Kelurahan dengan batas-batas wilayah Kecamatan Cerenti sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Inuman
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari wilayah, Kecamatan Cerenti tergolong ke dalam daerah yang memiliki permukaan tanah yang datar dan rawa-rawa dengan ketinggian di atas permukaan laut 40 m/dpl. Kecamatan Cerenti juga dilintasi oleh aliran sungai besar dari Sumatera Barat dengan nama “Sungai Kuantan” dan sungai tersebut bermuara di Kabupaten Indragiri Hilir (Kuala Enok).

Sebagai daerah tropis pada umumnya daerah Kecamatan Cerenti memiliki dua iklim yaitu, Musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni s/d Agustus, dan musim hujan yang terjadi pada bulan September s/d Februari, selebihnya terjadi pada masa peralihan antara kedua musim. Adapun curah hujan rata-rata adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.974 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak adalah 116 hari/tahun. Sedangkan suhu maksimum di Kecamatan Cerenti berkisar antara 32,7°C-33,7°C dan suhu minimum berkisar antara 21,4°C-22,7°C.

4.1.2 Demografis

Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan manusia disuatu wilayah atau daerah. Berikut jumlah penduduk di Kecamatan Cerenti berdasarkan keadaan akhir Desember 2019:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Cerenti

Jumlah Penduduk Kecamatan Cerenti	Jenis Kelamin		Jumlah KK
	Laki-Laki	Perempuan	
16.301	8.190	8.111	4.300

Sumber: Kantor Camat Cerenti 2019

Sementara jumlah penduduk Kecamatan Cerenti berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	16.250
2	Kristen	51
3	Hindu	-
4	Budha	-
Jumlah		16.301

Sumber: Kantor Camat Cerenti 2019

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Cerenti sebanyak 16.301 jiwa yang terbagi dalam 11 wilayah desa dan 2 kelurahan. Serta memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam.

4.2 Kantor Camat Cerenti

4.2.1 Sejarah

Kecamatan Cerenti berdiri pada tahun 1947 dengan nama Wali Nagori Cerenti, dengan Camat pertama yaitu Bapak Djauhari Salim. Pada saat itu Kantor Camat masih dalam keadaan menyewa rumah masyarakat yang berlokasi di Desa Pasar Cerenti (kini sudah menjadi Kelurahan Pasar Cerenti).

Pada tahun 1952 Kantor Camat Cerenti berpindah tempat ke kantor satu atap yang lokasinya berada dipinggiran Sungai Kuantan kelurahan Pasar Cerenti. Pada saat itu yang menjadi camat adalah Syamsuddin. Namun pada tahun 1961 Kantor Camat Cerenti berpindah tempat lagi dikarenakan kantor satu atap sudah tidak memadai lagi. Dengan masih lokasi yang sama yaitu Kelurahan Pasar Cerenti, kali ini pembangunan kantor yang baru berdiri atas inisiatif masyarakat Cerenti dengan cara swadaya dan gotong royong.

Kemudian, pada tahun 1971 kembali dibangun kantor camat Cerenti yang lebih representative. Lokasinya berada di Desa Kampung Baru. Pembangunan kantor yang baru ini dibiayai oleh dana provinsi Riau, sedangkan tanah tempat kantor dibangun berasal dari hibah masyarakat desa Kampung Baru. Luas tanah yang digunakan untuk pembangunan kantor camat Cerenti adalah 2460 m². Sedangkan luas bangunan kantor adalah 1095 m². Dan pada tahun 1972 Kantor Camat Cerenti secara resmi pindah ke kantor baru yang berlokasi di desa Kampung Baru dengan camat baru yaitu Mardi HS. Dan sampai sekarang kantor Camat Cerenti masih berdiri.

Kantor Camat Cerenti memiliki dasar hukum yang mengarah pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.2 Visi dan Misi

1. Visi

Kantor Camat Cerenti memiliki visi dalam pelayanannya yaitu “Terwujudnya pelayanan yang baik, benar, berakhlak, bebas bayar, berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak”.

2. Misi

Sedangkan untuk misi, Kantor Camat Cerenti meliputi:

- a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
- c. Menciptakan suasana harmonis dan rasa puas bagi yang dilayani
- d. Mengembangkan inspirasi, upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap kelengkapan
- e. Membebaskan bentuk pungutan, kecuali yang menjadi ketetapan pemerintah daerah maupun pusat.
- f. Memprioritaskan penyandang disabilitas atau yang setara dengan itu.

4.2.3 Tugas dan Fungsi Camat

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan Bupati tersebut Pasal 4 ayat (2), Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
11. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara;
12. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintahan di wilayahnya;
13. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan;
14. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati;

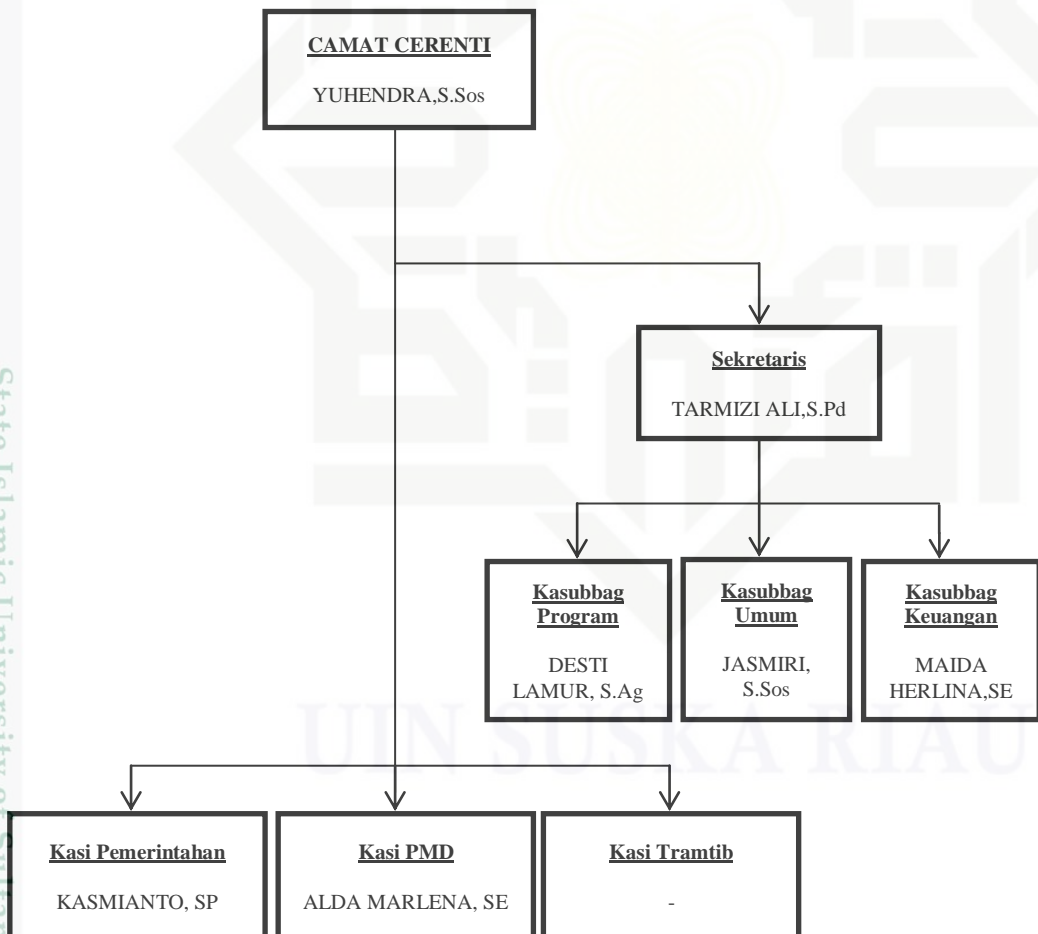
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
16. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

4.2.4 Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT CERENTI
Perda : Nomor 06 Tahun 2008**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa tugas dan fungsi camat yang tidak terlaksana dengan semestinya dalam rencana kerja kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan juga mengalami perubahan pada pertengahan Juni 2020 lalu akibat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga beberapa tugas dan fungsi camat mengalami kemunduran dalam waktu penyelesaiannya serta mengalami perubahan dalam sistem kerjanya.
2. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yakni terdapat pada anggaran yang terbatas karena Covid-19. Kemudian waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, masih adanya sumber daya manusia (SDM) yang belum cakap dalam penggunaan teknologi. Serta adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

6.2

Saran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat pada masa pandemi Covid-19 yang kurang maksimal, pemerintah kecamatan Cerenti diharapkan melakukan upaya koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga bila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, pemerintah sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kemudian, pada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu ada pemberian fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai pada pemerintah kecamatan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di kecamatan Cerenti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Surah Al-Baqarah ayat 30 tentang Pemimpin

Surah Ali-Imran ayat 28 tentang Memilih Pemimpin

Surah An-Nisa' ayat 59 tentang Pemerintah

Hadist Rasulullah SAW tentang Pemimpin, diriwayatkan oleh Muslim

Hadist Rasulullah SAW tentang Amanah Seorang Pemimpin, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim

BUKU

Agus, M.Si. (2016). *Manajemen Organisasi*. Mataram: IAIN Mataram.

Anggara, Sahya, Dr. M.Si. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia

Ardiansyah, Dr., M.Si. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prod. Dr. Meostopo Beragama.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Haryanti, Amelia. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS

Kristiono, N. (2019). *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Malang.

Muhammad, Drs., M.Si. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press

Rahayu, Ani Sri. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rifa'i, Muhammad, H., M.Pd. (2016). *Manajemen Organisasi*. Medan: Citapustaka Media Perintis.

Salim dan Syahrums. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thoaha, M. (2017). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Torang, S. (2016). *Manajemen Organisasi (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, Candra, Dr. M.Pd. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing

JURNAL/SKRIPSI

Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positium vol. 1 no. 1* , 87-88.

Ghifari M Farisi. 2018. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta

Indra Tri Gunawan. 2018. "Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan Di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau : Pekanbaru

La Ode Yamin, S. d. (2017). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat (Studi di Kantor Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna. *Jurnal SELAMI IPS Vol.2, No.46* , 191-192.

Larasati Ahluwalian, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 7, No. 2* , 129-130.

Nuzul Fitra Salam. 2019. "Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar: Makassar

Siti Marwiyah, N. H. (2020). Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Tengah Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* , 143-144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

INTERNET/WEBSITE

Ahli, P. M. (2018, April 21). *Pengertian Kecamatan dan Kelurahan Menurut Para Ahli*. Diambil Desember 15, 2020, dari [www.pengertianmenurutparaahli.net](https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kecamatan-dan-kelurahan/): <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kecamatan-dan-kelurahan/>

BPS. (2019, Januari 26). *Pemerintahan*. diambil Desember 15, 2020, dari [www.jatim.bps.go.id](https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html): <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>

Utami, F. A. (2020, Maret 16). *Apa Itu Pandemi?*. diambil Desember 15, 2020, dari [www.wartaekonomi.co.id](https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi): <https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19



Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan setelah terjadinya Pandemi Covid-19

Pelaksanaan Sosialisasi di SMA N 1 Cerenti sebelum terjadinya Pandemi Covid-19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara



Narasumber Bapak Yuhendra, S.Sos Camat di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Narasumber Bapak Tarmizi Ali, S.Pd di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Bapak Kasmianto, SP., Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Ibu Ratri Oktapiani, SP di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1228/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 16 Februari 2021 M
4 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

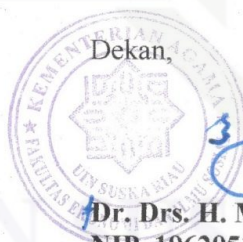
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Surthi Rahayu
NIM. : 11770523133
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38795
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1228/2021 Tanggal 16 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

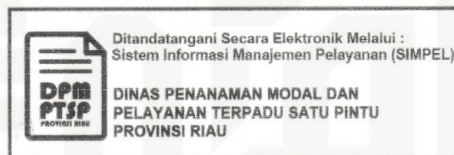
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SURTHI RAHAYU |
| 2. NIM / KTP | : | 11770523133 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1332/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 Februari 2021 M
 10 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. **Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.I.P, M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Surthi Rahayu
 NIM : 11770523133
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, C
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 49/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38795 Tanggal 17 FEBRUARI 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SURTHI RAHAYU**
 NIM : 11770523133
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : "ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
 Untuk melakukan Penelitian di : **KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S, Sos. MM
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN CERENTI
 Jalan Jenderal A. Yani No 66 Telp....
C E R E N T I

REKOMENDASI

Nomor : 070/Tramtib-CRT/II/2021/38

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 49/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi atas nama sebagai berikut :

Nama	: SURTHI RAHAYU
NIM	: 11770523133
Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Untuk melakukan penelitian di: **KANTOR CAMAT CERENTI KEC. CERENTI KAB. KUANSING**

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi dibuat.
3. Hasil riset/ pra riset dan pengumpulan data ini dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepadanya yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Cerenti
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021

An. CAMAT CERENTI,
 SEKCAM

TARMIZI ALI, S.Pd
 Pembina
 NIP. 19670321 198807 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN CERENTI
Jalan Jenderal A. Yani No 66 Telp.....
C E R E N T I

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420/UM-05/57

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TARMIZI ALI, S.Pd**
Jabatan : **Sekretaris Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SURTHI RAHAYU**
NIM : **11770523133**
Program Studi : **Administrasi Negara**
Universitas : **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
Maksud : **Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan Pengumpulan data di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Judul "Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi".**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Cerenti, 05 April 2021

An. CAMAT CERENTI
SEKCAM


TARMIZI ALI, S.Pd
Pembina
NIP. 19670321 198807 1 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



SURTHI RAHAYU, Lahir pada tanggal 02 Juli 1998 di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan dari pasangan Bapak Sudiharto dan Ibu Yulasmi. Penulis mempunyai sepasang adik kandung yang bernama Dwi Suchi Rahayu dan Tri Perdiance. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 002 Koto Peraku Kecamatan Cerenti pada tahun 2004-2010, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Cerenti pada tahun 2010-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Cerenti pada tahun 2013-2016. Setelah itu pada tahun 2017, penulis mendaftarkan diri sebagai Mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Tes Mandiri dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021. Dalam masa perkuliahan, pada tahun 2020 penulis telah melaksanakan PKL di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi selama 45 hari. Penulis juga melaksanakan kegiatan KKN di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar selama 45 hari. Terakhir, penulis juga telah melakukan penelitian di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

Email: surthirahayu@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.